

SKRIPSI

**PERTUKARAN KEPENTINGAN ANTARA AKTOR POLITIK
DAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARRU (2019-2020)**



DISUSUN OLEH:

FITRIANI

E041181007

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERTUKARAN KEPENTINGAN ANTARA AKTOR POLITIK DAN
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARRU (2019-2020)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI

E041181007



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTUKARAN KEPENTINGAN ANTARA AKTOR POLITIK DAN
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARRU (2019-2020)

Disusun dan Diajukan Oleh :

FITRIANI

E041181007

Telah diperiksa dan diujikan
Pada Tanggal 14 Februari 2023

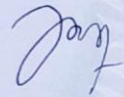
Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
NIP. 196511091991031108



Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 199205022019044001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERTUKARAN KEPENTINGAN ANTARA AKTOR POLITIK DAN
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARRU (2019-2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

FITRIANI

E041181007

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana Ilmu Politik
pada Program Studi ilmu politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 Februari 2023

PANITIA UJIAN :

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

(.....)

Anggota : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

(.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fitriani
NIM : E041181007
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTUKARAN KEPENTINGAN ANTARA AKTOR POLITIK DAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARRU (2019-2020)”** adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan sebagian skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 14 Februari 2023



Fitriani

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil a'lam, Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertukaran Kepentingan antara Aktor Politik dan Partai Politik di Kabupaten Barru (2019-2020)”**. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, atas pelajaran berharganya terkait pentingnya sabar dan pantang menyerah ditengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Selain itu, penulis berharap dengan skripsi ini dapat mendatangkan kebermanfaatan dan menambah pengetahuan kepada para pembaca.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan skripsi ini, tentu tidak terlepas juga dari beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta peranan dari pihak-pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil. Maka, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak

yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua penulis yakni bapak Sennung dan ibu St. Hamrianah atas segala cinta dan kasih sayang yang tulus, serta senantiasa memberikan doa dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis bisa berada di titik ini. Kepada saudara-saudari Edi Gunawan, Haswinda, dan Taqwin penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebut satu-persatu atas segala doa, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing 2 sekaligus penasehat akademik (PA) yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Periode 2022-2026 beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-

perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Dr. Phil. Sukri M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si, Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si dan ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr.Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Bapak Haryanto, S.IP, M.A, Ibu Ummi Suci Fathya

Bailusy, S.IP, M.IP, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada seluruh informan atas kesediannya telah menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
9. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
10. Kepada saudara saudariku Revolusi18, terima kasih telah menjadi sudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
11. Kepada Senior, terima kasih banyak karena telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk skripsi ini yaitu Kak Fichriyadi Hastira.

12. Kepada Sahabat Fyscon Syarifah, Kia, Dedys terima kasih karena selalu siap siaga dalam membantu penulis.
13. Kepada teman-teman terdekat penulis di kampus Azkia Aziza, Salmi, Vina Karlina, Sri Widyawati Ahmad, Indah Sari, Gina Yulianti, Nurfadillah, Pirda, Badaria, Sri Ratna Dewi, Nurul Mutyah Yunus, Selviana, Ayustina dan Rahmatang yang selalu menemani, mendukung serta menghibur penulis selama proses perkuliahan hingga semester akhir.
14. Untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis pada proses perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf karena penulis tidak bisa menyebutkan semuanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Februari 2023

Fitriani

ABSTRAK

Fitriani. NIM E041181007. Pertukaran Kepentingan antara Aktor Politik dan Partai Politik di Kabupaten Barru (2019-2020). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. dan Umni Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan jaringan Suardi Saleh dalam memenangkan Hasnah Syam pada Pileg DPR-RI tahun 2019 di dapil Sulawesi Selatan II khususnya di Kabupaten Barru serta mengetahui seperti apa bentuk pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada di Kabupaten Barru tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data yang terkait dengan tema penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenangkan Pileg 2019, Hasnah Syam memanfaatkan jaringan elit politik lokal Suardi Saleh (suaminya) yang merupakan ketua partai sekaligus kepala daerah sehingga baginya mudah saja untuk memobilisasi massa dari semua kalangan masyarakat terutama birokrasi. Selain itu, jaringan lainnya yang dimiliki dan dibangun oleh Hasnah Syam yakni jaringan partai NasDem, dalam hal ini partai turut andil dalam memenangkan Hasnah Syam. Jaringan tim sukses, strategi kampanye politik yang diterapkan oleh tim sukses Hasnah Syam menggunakan 3 metode, yaitu kampanye dialogis, monologis dan organisasi. Jaringan organisasi sosial, yakni Hasnah Syam memaksimalkan hubungan dengan lembaga-lembaga yang ia pimpin seperti Genre, PKK, kelompok pengajian, serta PAUD.

Adapun pertukaran kepentingan yang terjadi antara Suardi Saleh dan Partai Nasdem ialah, NasDem memiliki kepentingan agar memperoleh satu kursi DPR-RI di Dapil Sulsel II pada Pileg 2019 dengan cara memilih dan menggunakan Hasnah Syam sebagai caleg untuk mendulang suara karena merupakan istri Suardi Saleh sebagaimana ia punya basis massa khususnya di Kabupaten Barru sehingga berpeluang untuk mendapatkan satu kursi di parlemen. Sedangkan Suardi Saleh memiliki kepentingan untuk memperkuat pengaruhnya di Barru sebagai bupati melalui politik dan hubungan dengan pusat yakni anggota DPR-RI yang terpilih (sehingga mendukung istrinya) dan juga memanfaatkan NasDem sebagai pintu masuk untuk menjadi calon bupati di Pilkada 2020, sebagaimana ia diusung oleh partai NasDem tanpa mahar politik karena telah membantu memenangkan istrinya dalam Pileg.

Kata Kunci : Jaringan, Pertukaran Kepentingan, Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik.

ABSTRACT

Fitriani. NIM E041181007. Exchange of Interests between Political Actors and Political Parties in Barru Regency (2019-2020). Under the guidance of Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. and Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

The purpose of this study was to find out the use of Suardi Saleh's network in winning Hasnah Syam in the 2019 DPR-RI Legislative Election in the South Sulawesi II electoral district, especially in Barru Regency and to find out what form of interest exchange took place between the NasDem party and Suardi Saleh in the Pilkada in Barru Regency in 2020.

The research method used in this research is descriptive qualitative, namely providing an overview or explanation of the procedure for obtaining data related to the theme of this research.

The results of this study indicate that in winning the 2019 legislative election, Hasnah Syam utilized the network of the local political elite, Suardi Saleh (her husband), who is both party chairman and regional head, so it was easy for her to mobilize masses from all walks of life, especially the bureaucracy. In addition, another network owned and built by Hasnah Syam, namely the NasDem party network, in this case the party took part in winning Hasnah Syam. Success team network, the political campaign strategy implemented by Hasnah Syam's campaign team uses 3 methods, namely dialogic, monological and organizational campaigns. The network of social organizations, namely Hasnah Syam, maximizes relations with the institutions he leads, such as Genre, PKK, study groups, and PAUD.

The exchange of interests that occurred between Suardi Saleh and the Nasdem Party was that NasDem had an interest in obtaining a DPR-RI seat in the South Sulawesi II Dapil in the 2019 Legislative Election by selecting and using Hasnah Syam as a legislative candidate to gain votes because she is the wife of Suardi Saleh as she has mass base, especially in Barru Regency so that it has the opportunity to get one seat in parliament. Meanwhile, Suardi Saleh has an interest in strengthening his influence in Barru as regent through politics and relations with the center, namely members of the DPR-RI who are elected (thus supporting his wife) and also uses NasDem as an entry point to become a candidate for regent in the 2020 Pilkada, as he is promoted by the party NasDem without political dowry because he helped win his wife in the Legislative Election.

Keywords: Network, Exchange of Interests, Legislative Elections, Regional Head Elections, Political Parties.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Jaringan Sosial.....	10
2.2 Konsep Jaringan Politik.....	11
2.3 Teori Pertukaran Sosial.....	13
2.4 Konsep Pertukaran Kepentingan.....	16
2.5 Konsep Aktor Politik	16
2.5.1 Peran Aktor dalam Partai Politik	19
2.6 Konsep Partai Politik	20
2.7 Penelitian Terdahulu	24
2.8 Kerangka Pemikiran	29
2.9 Skema Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Sumber data Penelitian	34
3.3.1 Data Primer	34
3.3.2 Data Sekunder.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.1 Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>)	37
3.4.2 Arsip dan Dokumen	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Barru	41
4.2 Profil Hasnah Syam.....	44
4.3 Profil Suardi Saleh	46
4.4 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Barru	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Jaringan Hasnah Syam dalam pileg DPR-RI 2019	53
5.1.1 Jaringan Keluarga	53
5.1.1.1 Jaringan Elit Politik Lokal.....	54
5.1.2 Jaringan Partai NasDem	57
5.1.3 Jaringan Tim Sukses.....	59
5.1.4 Jaringan Organisasi Sosial.....	64
5.2 Pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada di Kabupaten Barru tahun 2020	68
5.2.1 Partai NasDem Memperoleh Satu Kursi DPR-RI di Dapil Sulsel II Pada Pileg 2019.....	68
5.2.2 Istri Suardi Saleh (Hasnah Syam) Dimasukkan Sebagai Caleg DPR-RI pada Pileg 2019 dan Ia Membantu Istrinya untuk Menang.....	71
5.2.3 Suardi Saleh Diusung Partai Nasdem pada Pilkada 2020.....	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Kesimpulan	78

6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

5.1. Poster Hasnah Syam semasa kampanye

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3. Daftar Nama-Nama Informan

Tabel 4.1. Data Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun Rukun Tetangga menurut per Kecamatan di kabupaten Barru (2021)

Tabel 4.4. Nama-Nama Bupati Barru

Tabel 5.2 Data Perolehan Suara drg Hasnah Syam Pada Pileg 2019 di Dapil Sulsel II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepentingan dan aktor politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain serta kajian yang penting dalam ilmu politik, karena berjalannya kehidupan politik itu sendiri diwarnai (atau bahkan juga ditentukan) oleh kehadiran aktor-aktor politik. Hubungan antara aktor politik dan kepentingan bisa mengambil beraneka ragam bentuk. Salah satunya ialah adanya pengaruh kepentingan terhadap bagaimana aktor politik bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan siapa saja orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan politik dan ikut dalam pemilihan umum (pemilu) dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut (seperti memenangi pemilu dan kemudian membuat kebijakan ketika menjalankan pemerintahan) (Bolleyer 2016).¹ Adapun kriteria kandidat yang biasanya dicari oleh partai politik adalah mereka yang memiliki konsep, potensi dan jaringan.

Pada saat melalui proses rekrutmen politik ini, partai politik berusaha menjaring dan menemukan kader-kader partai yang dianggap bisa menjalankan kekuasaan dengan baik, terutama jika terpilih menjadi anggota dewan dalam pemilu. Namun tak jarang juga yang menggunakan

¹ Sandhiyudha, Arya. *Ijtihad Islamisme Turki ala Erbakan*. Jurnal Politik. Vol 2, No 1. Halaman 1.

cara pragmatis. Contohnya, partai memilih orang yang punya peluang dan massa yang besar dalam suatu pemilihan. Pragmatisme partai ini adalah akibat adanya keterlibatan logika untung-rugi, serta logika-logika matematis-ekonomis lainnya, dalam memutuskan strategi. Sikap pragmatis tersebut tidak terlepas dari motivasi akan pemenuhan kebutuhan kekuasaan.

Persaingan dalam dunia politik merupakan kudrat alamiah yang harus dilewati oleh para politisi untuk mencapai kekuasaan. Banyaknya orang akan merebut kursi DPR-RI membuat mereka yang aktif sebagai salah satu calon anggota legislatif berlomba untuk merebut hati masyarakat di dapilnya melalui usaha-usaha menarik perhatian dan dukungan publik. Karena kompetisi politik akan berakhir jika muncul dukungan secara luas terhadap perjuangan suatu kelompok politik ataupun individu (Firmanzah, 2007).² Pada era demokrasi dewasa ini, sudah seharusnya para kontestan caleg memiliki kemampuan dalam memikat dan meyakinkan pemilih. Salah satu metode yang menentukan kemenangan suatu calon dalam kontestasi pemilihan umum adalah pemanfaatan jaringan.

Menghadapi sistem suara terbanyak, yang memicu persaingan antar Calon legislatif, tentu mesin partai menjadi perebutan bagi para Caleg. Sehingga, Caleg-caleg yang tidak berhasil mendapat akses pemanfaatan mesin partai, harus mencari cara lain di luar partai untuk mengarahkan

² Firmanzah. 2007. *Marketing politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

pemilih. Bagi Caleg-caleg yang memperoleh akses pemanfaatan mesin partai, juga tidak cukup bila hanya mengandalkan mesin partai. Mereka juga harus mencari cara lain di luar mesin partai untuk menjaga suara maupun untuk meningkatkan kemungkinan perolehan suara. Salah satu strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan memanfaatkan jaringan. Pemanfaatan jaringan merupakan usaha-usaha para Caleg untuk mengarahkan pemilih dengan memanfaatkan unsur-unsur di luar partai.³ Jaringan-jaringan yang dimaksud disini meliputi jalur sosial apapun yang dapat dimanfaatkan oleh seorang Caleg. Bentuk jaringan sosial tersebut biasanya adalah hubungan kekerabatan atau persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan kerja, dan lain sebagainya.

Didalam politik, jaringan sangat berpengaruh terhadap kemenangan seseorang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan umum (Pemilu) seperti yang terjadi di Pileg DPR RI khususnya daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan, dimana ada hal yang menarik yakni ada 1 dapil lebih tepatnya di dapil Sulsel II yang disebut oleh masyarakat sebagai dapil neraka. Ini bukan tanpa alasan karena dapil ini dipenuhi oleh aktor-aktor politik besar seperti Syahrul Yasin Limpo (mantan Gubernur Sulsel 2 periode), Aziz Qhahar Mudzakkar (mantan anggota DPD RI), Akbar Faizal (petahana dari Partai Nasdem), Syamsul Bachri (petahana dari Partai Golkar), Andi Yagkin Padjalangi (mantan

³ Tawakkal, George Towar Ikbal. 2009. *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih "Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009"*. Tesis. UNDIP. Halaman 192

legislator DPRD Sulsel), Andi Rudyanto Asapa (mantan Bupati Sinjai) serta politisi lainnya.

Setelah hasil rekapitulasi Pileg keluar, ada beberapa nama baru yang secara mengejutkan publik karena mengalahkan petahana dan politisi senior. Salah satunya terdapat di dapil II yang terdiri dari Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare, Akbar Faizal dan Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem gagal mendapatkan kursi. Kedua politisi senior ini dikalahkan oleh istri Bupati Barru yakni Hasnah Syam dengan mengumpulkan sebanyak 51.871 suara.

Siapa itu Hasnah Syam? Pertanyaan inilah yang kerap terlontar ketika rekap suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II menyebar pada pemilu 2019 lalu. Bukan hanya suaranya yang terbanyak yang membuat Hasnah menjadi fenomenal. Dia jadi sorotan utama karena mampu mengalahkan tokoh politik yang cukup populer seperti yang telah disebutkan diatas. Selain itu, adapun lawan lainnya dari partai Nasdem yakni, Lutfi Halide, Achmad Saiful Andi Sapada, Sukma Nurani, Sitti Maryam, Nasiruddin dan Syamsuddin.

Hasnah Syam merupakan istri Bupati Barru, Suardi Saleh. Sebelum terjun ke dunia politik, Hasnah adalah seorang dokter gigi sesuai dengan gelarnya sebagai drg. Siti Hasnah Syam. Berprofesi sebagai Dokter gigi sekaligus istri Bupati Barru membuat Hasnah aktif berinteraksi dengan

masyarakat Barru. Hal ini juga yang mengantarkannya menuju DPR RI Senayan dan mampu mengalahkan kompetitornya. Pertarungan Hasnah Syam di dapil Sulsel II bukanlah perkara ringan, karena di dapil ini terdapat beberapa politisi senior yang turut berlaga dalam pileg 2019.

Kemenangan yang diperoleh drg. Hasnah Syam dalam Pileg 2019 ini tidak terlepas dari wujud keberhasilan pemanfaatan jaringan yang dilakukannya. Adapun jaringan dalam hal ini yang dimaksud ialah salah satunya yakni peranan elit, dimana elit politik ini sekaligus memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Elit merupakan orang-orang yang sukses dan yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan adalah konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya.⁴

Kemampuan elit politik lokal dalam mendorong partisipasi politik warga masyarakat pada Pemilu/Pilkada tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut. Lingkaran kekuasaan merepresentasikan sekelompok kecil individu (elit) yang memiliki kekuasaan yang lebih besar

⁴ Lumendek Destrina. Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Jurnal Politico. Vol 7, No 3 (2018).

dibandingkan dengan sekelompok besar individu (massa) dengan sedikit kekuasaan atau bahkan mungkin tidak memiliki kekuasaan. Pola hubungan antara elit dengan massa menunjukkan bahwa massa bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap perintah dari elit karena pada diri elit tersebut melekat kekuasaan. Ini juga terjadi pada Pileg 2019 khususnya dapil Kabupaten Barru, dimana elit lokal dapat mengajak dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk hadir berpartisipasi dalam Pemilu/Pilkada dan memilih salah satu kandidat sesuai dengan keinginan si elit tersebut. Tindakan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca.⁵

Adapun Elit politik lokal yang dimaksud dalam hal ini ialah Suardi Saleh yang merupakan bupati di Kabupaten Barru dimana pengaruhnya cukup besar bagi kemenangan Hasnah Syam dalam hal ini mampu mengerahkan birokrasi untuk mendukung istrinya mengingat statusnya yang sebagai bupati sehingga ia mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Sedangkan jaringan lainnya diperoleh dari organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), selain itu kemenangannya juga tentu tak terlepas dari dukungan partainya hingga peranan tim suksesnya yang telah bekerja keras.

⁵ Fadli, Muhammad dkk. Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Sosial Politik Humaniora /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018.

Suardi Saleh merupakan kader sekaligus ketua dari partai NasDem yang dimana ia membantu istrinya dalam kontestasi politik di dapil Sulsel II khususnya di Kabupaten Barru. Pada saat menjelang Pilkada 2020 tiba, dia kembali mencalonkan diri sebagai bupati Barru. Tentu dibalik pencalonan kembali seorang petahana pada pemilu atau pilkada semata-mata hanya karna ingin melanggengkan kekuasaan. Sebagaimana kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.

Terlepas dari pencalonan hingga kemenangan Hasnah syam pada pileg 2019 begitupun dengan Suardi Saleh pada Pilkada 2020 di Kabupaten Barru, tentu dibaliknya terdapat sebuah pertukaran kepentingan antara aktor dan partai pengusung. Sebagaimana partai tiba-tiba mengusung seorang istri bupati yang dimana ia bukanlah merupakan kader dari partai tersebut namun rekrutmen caleg tersebut dilakukan semata-mata untuk meraup suara dengan cara pragmatis, tentu ketika bupati tersebut berhasil meloloskan sang istri pada Pileg pastinya ada *benefit* yang diberikan oleh partainya.

Berdasarkan penjelasan diatas nampaknya ada proses kepentingan politik yang saling terkait saat pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Barru dalam rekrutmen politik maupun proses dalam kemenangan yang di raih oleh

Hasnah Syam dan Suardi Saleh, Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul : **“Pertukaran Kepentingan antara Aktor Politik dan Partai Politik di Kabupaten Barru (2019-2020)”**. Dengan melihat luasnya cakupan dalam tulisan ini, maka penulis memberikan batasan penelitian dengan rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menekankan pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana drg Hasnah Syam memanfaatkan jaringan Suardi Saleh dalam memenangkan Pileg DPR-RI tahun 2019 di dapil Sulawesi Selatan II (Kabupaten Barru)?
2. Bagaimana pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada di Kabupaten Barru tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan jaringan Suardi Saleh dalam memenangkan Hasnah Syam pada Pileg DPR-RI tahun 2019 di dapil Sulawesi Selatan II (Kabupaten Barru)

2. Untuk mengetahui seperti apa bentuk pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada di Kabupaten Barru tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yakni;

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Menjadi bahan referensi atau literatur untuk bahan kajian bagi penelitian terkait selanjutnya terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- b. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai pertukaran kepentingan antara aktor politik dan partai politik

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pembaca yang tertarik mengetahui mengenai Pertukaran Kepentingan antara Aktor Politik dan Partai Politik di Kabupaten Barru (2019-2020)
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini menguraikan tentang konsep, teori dan penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penulis menganalisis masalah ini dengan menggunakan teori jaringan sosial, teori pertukaran sosial serta tinjauan konsep jaringan politik, pertukaran kepentingan, aktor politik dan partai politik. Hal tersebut dianggap saling terkait dengan fenomena tema masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, sekaligus menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

2.1 Teori Jaringan Sosial

Teori jaringan dikemukakan oleh Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa jaringan merupakan hubungan kerja satu orang dengan orang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan. Jaringan memungkinkan orang-orang mencapai tujuan kelompok jaringan dan mengikat masyarakat secara bersama-sama. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain norma dan kepercayaan. Konsep jaringan dalam kapital sosial memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh

norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan hingga mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam *capital* sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Lawang, 2005).

Tebentuknya jaringan sosial misalnya, secara operasional ditunjukkan melalui pemilihan electoral guna memperjuangkan dan mendorong partai politik dan calon-calonnya untuk memenangkan pemilu baik eksekutif maupun legislatif.

2.2 Konsep Jaringan politik

Jaringan merupakan hubungan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya sehingga adanya hubungan yang terjalin antara kedua individu. Jaringan pada mulanya terbentuk dari proses interaksi yang dilakukan oleh seorang individu dengan individu lain. Jaringan akan berkembang sesuai dengan keberadaan dan hal yang dilakukan oleh seseorang individu sehingga jaringan sangatlah berpengaruh terhadap elektabilitas seseorang.

Seperti yang dikatakan dalam jurnal online sosiologi Fisip Unair bahwa jaringan merupakan sejumlah kecil titik-titik yang dihubungkan

oleh garis-garis, titik-titik itu dapat berupa orang, peran, posisi, status, kelompok, tetangga, organisasi, masyarakat, nasional atau negara.⁶ Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa jaringan dapat berbentuk berbagai hal dan komponen. Ketika jaringan itu di arahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik maka semua komponen akan membicarakan politik, maka terbentuklah jaringan politik.

Jaringan merupakan turunan dari konsep modal sosial. Jaringan terbentuk karena adanya norma dan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang. Kepercayaan yang diberikan seseorang itu akan mengalir dan membentuk anak panah sehingga terbentuk jaringan yang kuat.

Denny (2006) menjelaskan bahwa jaringan politik merupakan suatu jaringan dimana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain untuk menjalin hubungan politik yang kuat. Denny juga menyebutkan bahwa pada hubungan politik yang kuat terjadi interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang sama.

Adapun teknik membangun jaringan politik, sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan kesuksesan di era saat ini salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang politisi, pebisnis atau eksekutif adalah membangun jaringan atau *networking*. *Networking* bukan lagi sekedar keterampilan yang “*nice to*

⁶ Komunitas.jurnal online sosiologi Fisip Unair. Vol. 3.2, Juli 2014.Hlm 4

have” (bagus untuk dimiliki) tetapi sekarang menjadi *“necessary to have”* (harus dimiliki).

2. *Networking* bukan hanya dilakukan dengan pihak eksternal organisasi tetapi juga dengan internal organisasi, misalnya antara pengurus dengan anggotanya antara politisi dengan konstituennya, harus terbangun *networking* yang sempurna. Bila *Networking* internal tidak terbangun dengan baik, maka potensi konflik struktural dan konflik kepentingan antar pengurus dan juga anggota akan menganga lebar, dan itu berarti energi organisasi akan banyak terserap untuk meredam konflik-konflik yang terjadi sementara kerjakerja politik membangun jaringan eksternal jelas akan kurang terurus dengan baik.
3. Pada dasarnya *networking* adalah usaha membangun hubungan dengan orang lain, bisa dalam bentuk interaksi atau pertukaran informasi. Setiap orang harus punya gaya sendiri dan pendekatan *networking* yang memiliki khas, manjur dan sesuai dengan kepribadiannya.

2.3 Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang memberi atau menukar benda-benda yang mengandung nilai berdasarkan suatu peristiwa sosial tertentu antar individu. Benda

yang dapat dipertukarkan bukan berupa benda nyata, melainkan benda yang tidak nyata.

Teori ini menelaah bagaimana kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, dimana hubungan itu berpengaruh terhadap kontribusi orang lain. Thibaut dan Kelley pencetus dari teori ini, mengemukakan bahwa orang mengevaluasi hubungannya bersama orang lain dengan mempertimbangkan konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang telah dilakukan, orang akan memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan tersebut atau pergi meninggalkannya.⁷

Akar teori pertukaran sosial berasal dari behaviorisme dalam ilmu psikologi. Oleh karena itu, teori pertukaran familiar disebut sebagai sosiologi perilaku. Sosiologi perilaku sebagai reduksi ilmu psikologi tertarik pada hadiah (atau penguat) dan ongkos (atau hukuman). Hadiah ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan ongkos mengurangi kemungkinan perilaku. Gagasan tentang hadiah dan ongkos dalam behaviorisme inilah yang memengaruhi teori pertukaran. George Homans mengemukakan bahwa tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman bagi orang lain. Oleh karena itu, pertukaran itu saling dapat

⁷ Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi-Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 265.

menguntungkan atau sepanjang dianggap saling menguntungkan oleh kedua belah pihak.⁸

Menurut Homans Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran sosial ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan analisis yaitu satuan yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu.
2. Motif pertukaran sosial diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.
3. Faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu "hadiah" (*reward*) yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. *Cost* dapat didefinisikan sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan *reward* apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.

⁸ Tilome, Apris Ara. Andi Dody M. Putra Agustang dan Andi Agustang. 2021. "Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Gorontalo". UNM.

4. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. *Reward* adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (Wirawan, 2012: 176).

2.4 Konsep Pertukaran Kepentingan

Pertukaran kepentingan merujuk pada pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Thibault dan Kelley dimana ia menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang, dimana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertukaran kepentingan tentu ada simbiosis mutualisme.

Begitupula dalam dunia politik, bahwasanya pertukaran kepentingan dalam proses politik tersebut adalah niscaya. Dalam setiap momentum pemilihan umum, elit, *voters*, dan partai politik senantiasa berada dalam situasi strategis, saling bergantung, saling membutuhkan, dan tentu saja saling menguntungkan.

2.5 Konsep Aktor Politik

Dalam arti sempit, Brian McNair (2003: 5) mendefinisikan aktor politik sebagai berikut *“those individuals who aspire, through organisational and institutional means, to influence the decision-making process. They may seek to do this by attaining institutional political*

power, in government or constituent assemblies, through which preferred policies can be implemented'. Aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, dimana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan.

Aktor politik berarti individu yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara tentang politik tentu tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan atau memiliki posisi penting. Aktor politik adalah pribadi unggul yang mempunyai kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Peran aktor disini adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan

masyarakat. Aktor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dasar fundamental dari pendekatan aktor adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut aktor. Kelompok aktor adalah suatu fenomena abadi yang selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Aktor merupakan kelompok kecil dari warga negara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik.⁹

Dalam mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yakni;

1. Metode Posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan serta kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani jutaan rakyat.
2. Metode Reputasi, aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi serta kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan lalu

⁹ N, Abd. Rahman. 2015. *Aktor politik Sebagai salah satu kekuatan politik di indonesia*. UNHAS. Diakses pada 27 Februari 2022.

kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

3. Metode Pengaruh/Keputusan, aktor politik ialah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang ia miliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik.

2.2.1 Peran Aktor dalam Partai Politik

Aktor politik bisa dikatakan seseorang yang menjadi pusat perhatian dibidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Seorang tokoh bernama Letser G. Seligman mengemukakan bahwa proses pengangkatan aktor-aktor politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

- a. Masalah kekuasaan
- b. Legitimasi elite politik
- c. Representativitas elite politik
- d. Korelasi antara pengangkatan aktor-aktor politik dengan perubahan politik.

Aktor politik tidak akan pernah lepas dari sebuah partai politik, karena partai politiklah yang kemudian melahirkan kader-kader atau calon aktor politik yang kemudian akan terjun dalam

dunia politik. Peranan aktor politik sangat penting guna menghimpun kekuatan politik suatu partai, karena biasanya sosok seorang tokoh politik yang telah tergambar bagus citranya di masyarakat cenderung akan mudah dimobilisasi oleh seorang aktor politik. Begitu halnya ketika seorang aktor politik suatu partai politik terjerat suatu kasus yang kemudian akan memperburuk citranya di mata masyarakat, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak bagi partai politik. Artinya seorang aktor politik merupakan kunci keberhasilan atau malah menjadi awal penyebab keterpurukan sebuah partai politik, karena aktor politik mempunyai posisi yang penting dalam suatu partai politik.

2.3 Konsep Partai politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan serta pelaksanaan keputusan.

Ichlasul Amal mengatakan bahwa keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.¹⁰ Sebagai organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan

¹⁰ Amal, Ichlasul. Teori-teori Mutahir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007, h. i-x

untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Para ahli telah banyak mendefinisikan apa itu partai politik, baik para ahli dari Barat maupun ahli dari Indonesia sendiri. Beberapa definisi tentang partai politik tersebut diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia”.¹¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk

¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan programnya.¹²

Definisi dari partai politik masih banyak sekali, Namun terlepas dari variasi yang ada, para pakar sepakat bahwa partai memiliki ciri-ciri berikut.

Pertama, sekelompok orang yang se-ide dan berupaya mewujudkan ide-ide mereka dalam kehidupan masyarakat. Perdebatan sering muncul apakah ide yang dimaksud di sini adalah perbedaan ideologi dalam pengertian prinsip-prinsip dasar bernegara, atau perbedaan cara mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya bergerak pada tataran abstrak. Pada awalnya orang percaya bahwa ide di sini bermakna perbedaan pada prinsip-prinsip dasar. Namun pemahaman itu berlaku pada bangsa yang masih muda dimana sedang berjuang untuk mengintegrasikan suku bangsa yang ada. Ketika integrasi nasional tercapai, maka ide lebih banyak diartikan sebagai sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bersama.

Kedua, memiliki organisasi yang rapi, yang menjamin kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. Termasuk di dalamnya adalah cara menseleksi kandidat yang layak untuk diusung, bagaimana menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat, dan cara menjaga dukungan massa ‘agar suara partai’ tetap diperhitungkan oleh partai-partai lain. Adanya ciri-ciri inilah

¹² Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). halaman 403-404.

yang membedakan sebuah partai politik dengan organisasi politik lainnya seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Ketiga, susunan agenda kebijakan publik. Berbeda dari bentuk kelompok yang lainnya, partai memiliki semacam kerangka pikir yang dipakai oleh setiap aktivitasnya untuk menerjemahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Kerangka pikir ini menjadi ciri yang membedakan satu partai dengan partai yang lain. Hingga sebenarnya agenda pembicaraan publik itu penuh dijejali oleh persepsi partai politik yang ada. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada inilah kemudian anggota masyarakat memutuskan siapa di antara partai yang ada, yang menawarkan solusi pemecahan paling logis terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.

Keempat, menepatkan wakil dalam jajaran pemerintahan. Agar idealisme partai dapat terwujud, melalui pemilu partai harus mampu menempatkan wakil-wakilnya ke dalam jajaran pemerintahan. Keberadaan wakil partai dalam jajaran itu adalah untuk menjamin bahwa visi partai politik terhadap satu masalah memengaruhi isi atau jiwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, atau setidaknya menjadi pertimbangan sebelum keputusan akhir ditentukan. Catatan yang harus dikemukakan di sini adalah dalam khasanah pemerintahan dalam arti kata pemerintahan dibedakan ke dalam pengertian yang sempit dan yang luas. Pengertian yang sempit menunjuk kepada bisa tugas eksekutif.

Sedangkan pengertian yang luas menunjuk kepada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹³

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Pertukaran Kepentingan antara Partai Politik dan Aktor Politik di Kabupaten Barru (2019-2020)”. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pemanfaatan jaringan Suardi Saleh dalam memenangkan Hasnah Syam pada Pileg DPR-RI tahun 2019 di dapil Sulawesi Selatan II (Kabupaten Barru), serta untuk mengetahui seperti apa bentuk pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada di Kabupaten Barru tahun 2020. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam Menyusun karya tulis ini.

- 1) Penelitian pertama dilakukan oleh Indria Sofiatul Hilmi yang berjudul *“Modal Sosial Siti Rochmah Yuni Astuti Dalam Pemilihan Legislatif 2019”*

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Siti Rochmah Yuni Astuti dalam Pemilihan Legislatif 2019 dan untuk mengetahui modal sosial yang paling berkontribusi yang dimiliki oleh Siti Rochmah Yuni Astuti dalam Pemilihan Legislatif 2019.

¹³ Muhtar Haboddin, Muh Arjul. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : UB Press. Halaman 185-186.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa Modal yang dimiliki Siti Rochmah Yuni Astuti dalam Pemilihan Legislatif 2019 ada tiga bentuk yaitu adanya jaringan/hubungan (*networks*), kepercayaan (*trust*), dan norma (*norms*). Bagi Siti Rochmah Yuni Astuti jaringan memiliki manfaat yang paling besar terhadap keberhasilan Siti Rochmah Yuni Astuti dalam kemenangannya di pemilihan legislatif 2019 ini. Karena dengan latar belakang sebagai seorang penyanyi yang telah dimulai sejak masih menduduki bangku SMA, dimulai dari panggung ke panggung hingga akhirnya dapat membentuk grup dangdut yang besar di Kabupaten Blora membuat Siti Rochmah Yuni Astuti memiliki jaringan atau hubungan dengan masyarakat yang sangat luas. Selain sebagai *public figure* juga memiliki rumah makan yang besar pula di Kabupaten Blora. Jaringan yang diperoleh selain dari latar belakang sebagai seorang *public figure* dan usaha rumah makan, juga aktif dimedia sosial salah satunya media sosial Instagram dan WhatsApp, didalam media sosial itu Siti Rochmah Yuni Astuti aktif dalam mengupdate mengenai kegiatannya dan digunakan pula untuk media kampanye saat masa kampanye pemilihan legislatif 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada fokus penelitiannya yakni terkait peran jaringan dalam memenangkan seorang calon legislatif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada subyek yang diteliti, dimana penulis sebelumnya meneliti tentang caleg dari aktor politik incumbent sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti caleg dari aktor politik pendatang baru.

- 2) Penelitian kedua dilakukan oleh Arifman Ngato, Agustinus Pati dan Maxi Egeten yang berjudul “Strategi Pemenangan Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Periode 2014-2019 Di Kabupaten Pulau Morotai”.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa strategi pemenangan yang direncanakan oleh kandidat calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Pulau Morotai merupakan cara atau taktik yang telah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan, namun strategi itu tidak lepas dari kontribusi strategi partai politik yang diusungnya dalam mencapai suatu tujuan. Ada beberapa strategi-strategi secara garis besar yang dijalankan NasDem dan menjadi fenomena besar kemenangan Partai NasDem dalam pemilu legislatif 2014-

2019 di Kabupaten Pulau Morotai yakni penguatan di beberapa sektor yang mendukung, seperti citra partai yang sudah ada, birokrasi yang ada di pemerintahan, figur pimpinan partai melalui Suryah Paloh. Adapun strategi lain yang dilakukan seperti dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, memilih sosok figur yang baik dan memiliki rekam jejak yang baik, sosialisasi, mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan kampanye yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada tujuan penelitian yakni terkait strategi partai untuk dapat mencapai hasil berupa perolehan suara yang cukup untuk memperoleh kursi parlemen di pusat ataupun daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni fokus pada strategi politik partai NasDem dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada strategi politik partai NasDem dengan lokasi penelitian di Kabupaten Barru pada Pileg 2019 dan Pilkada 2020.

- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Apris Ara Tilome, Andi Dody M. Putra Agustang dan Andi Agustang dalam penelitian yang

berjudul “Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Gorontalo”.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain: *Pertama*, relasi pertukaran sosial elit politik merupakan situasi strategis yang saling bergantung, saling membutuhkan, dan sama-sama saling menguntungkan sekaligus sebagai suatu upaya konsolidasi kekuatan untuk mencapai keterpilihan/kemenangan dalam momentum pemilihan umum kepala daerah. *Kedua*, pola pertukaran sosial didasarkan pada sejumlah potensi kepemilikan sumber daya elit baik figuritas, finansial, maupun kekuatan sosial yang menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menentukan dan memberikan restu/rekomendasi partai kepada pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, strategi pertukaran sosial adalah bagaimana elit politik memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. *Keempat*, implikasi sosiologis adalah bagaimana interaksi sosial politik itu berlangsung dalam kehidupan masyarakat pasca pemilihan calon kepala daerah. Apakah masyarakat terkotak-kotak, menimbulkan gesekan dan bagaimana upaya meredusir potensinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyukseskan

pemilihan kepala daerah, partai politik memanfaatkan figur pasangan calon untuk mengukuhkan pengaruh politisnya untuk mendulang dukungan dari masyarakat (pemilih). Walaupun pada faktanya pasangan calon kepala daerah, pemilih, dan partai politik tidak memiliki kedekatan hubungan baik secara ideologis maupun sosiologis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada tema yang diangkat yakni terkait pertukaran sosial, dimana dengan adanya pertukaran sosial ini dapat memberikan keuntungan bagi elite politik dan partai politik, sekaligus sebagai suatu upaya konsolidasi kekuatan untuk mencapai keterpilihan/kemenangan dalam momentum pemilihan umum kepala daerah.

Perbedaannya, dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada pertukaran kepentingan dalam memenangkan aktor politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah saja tetapi juga fokus pada pemilihan legislatif.

2.5 Kerangka pemikiran

Pada pemilihan legislatif di daerah pemilihan Sulsel II, para petahana harus bersaing dengan istri kepala daerah dan mantan kepala daerah. Begitupun persaingan di partai NasDem, yang

dimana istri dari kepala daerah Kabupaten Barru Suardi Saleh (Hasnah Syam) jadi sorotan utama karena mampu mengalahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode, Syahrul Yasin Limpo dan politisi tenar NasDem, Akbar Faizal. Hal ini menunjukkan bahwasanya, pertarungan tidak hanya melibatkan petahana tetapi juga pendatang baru yang sebenarnya sudah memiliki citra yang mumpuni.

Fenomena istri kepala daerah dan mantan kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang maju bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 DPR RI cukup menarik untuk dibahas. Fenomena tersebut dinilai selain menjadi pelengkap kebutuhan persentasi caleg perempuan dari Parpol, juga dikarenakan merasa dirinya memiliki kekuatan elektoral yang bersumber dari suaminya.

Partai yang merupakan kendaraan politik bagi setiap caleg pastinya memiliki startegi-strategi tertentu baik dalam proses seleksi kandidat hingga kemenangannya dalam pemilu. Namun sebelum kemenangan yang diperoleh bagi partai politik itu sendiri, ada caleg-caleg ini yang bekerja, dalam hal ini bagaimana partai memanfaatkan/menggunakan orang-orang/individu untuk mencapai kepentingan politiknya. Adapun kepentingan dari partai NasDem disini ialah untuk mendapatkan kursi di parlemen. Pola hubungan pertukaran kepentingan ini saling mendapatkan keuntungan bagi partai politik dengan aktor politik.

Terkait pertukaran kepentingan kita berbicara mengenai dua subjek, dalam hal ini menyangkut partai politik dan aktor politik. Kenapa mengarah ke parpol? karena parpol dalam kasus ini cenderung memilih orang yang punya peluang dan massa yang besar dalam suatu pemilihan. Begitupun calon (elite) dalam konteks politik elektoral indonesia hari ini harus menggunakan partai ketika ingin ikut pemilihan. Jadi mau tidak mau elit akan mencari partai dan partai akan mencari calon (elite) yang punya daya tawar yang menjanjikan.

2.6 Skema Pikir

